

Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

Safuridar

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra
Langsa Aceh

e-mail: safuridar@unsam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar efektivitas pinjaman dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Metode penelitian ini adalah deskriptif di mana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket), wawancara, observasi (pengamatan). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota spp yang menerima pinjaman dana bergulir dari PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu sebanyak 67 responden. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan efektivitas pinjaman dana bergulir program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan terhadap masyarakat kurang mampu di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau berdasarkan kuisisioner yang dibagikan adalah efektif dengan nilai skala likert 3,89 dibulatkan menjadi 4. Nilai efektif ini dapat diartikan anggota spp telah menggunakan dana bantuan untuk kegiatan yang produktif dengan adanya peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana pinjaman, bertambahnya sumber pendapatan, berkurangnya jumlah pengangguran di desa Paya Bedi. Hal ini juga terlihat dari 4 indikator dalam melihat efektivitas pinjaman dana bergulir, yaitu yang terdiri dari : tingkat kualitas, tingkat kuantitas, modal dan hasil/ouput. Dari penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pinjaman dana bergulir yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah salah satu program yang efektif bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga yaitu dengan membuka atau mengembangkan usaha.

Kata Kunci: Efektivitas, Pinjaman Bergulir, PNPM Mandiri

1. PENDAHULUAN

Negara dikatakan berkembang dapat dilihat dari keadaan tingkat ekonomi, kependudukan, pengangguran, teknologi dan kesehatan, untuk keadaan ekonomi suatu negara berkembang memiliki keterbatasan dari segi modal, hal ini disebabkan tingkat tabungan dan investasi di dalam negeri yang rendah.

Untuk mengurangi semua masalah ini peran Pemerintah sangat dibutuhkan, dengan kebijakan-kebijakan yang secara langsung menyentuh ke masyarakat, dengan program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pemberian pelatihan-pelatihan atau pemberian kredit modal usaha, dari pelatihan- pelatihan seperti perbengkelan, jahit-menjahit, membuat

kue serta ketrampilan lainnya yang bersifat keahlian diharapkan setelah itu bisa membuat sendiri suatu kewirausahaan, dari sisi permodalan masyarakat terkadang sudah berusaha untuk mencari cara bagaimana bisa mendapatkan modal agar dapat memulai suatu usaha atau mengembangkan usaha yang sudah berjalan, namun dikarenakan dari persyaratan yang sangat memberatkan berupa anggunan, tentunya hal itu menjadi suatu halangan.

Angka kemiskinan secara umum di Indonesia menurun 0,25 Juta jiwa atau sekitar 28,01 juta jiwa (10,86%) pada Maret 2016 menjadi 27,76 Juta jiwa (10.70%) pada September 2016 (Berita resmi BPS, Januari 2017). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan berdasarkan *Worldfactbook*, BPS, dan *World Bank*, di tingkat dunia penurunan

jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain (Berita Resmi TNP2K, 2012).

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN, 2015), menjelaskan dalam sejarah upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas di setiap era pemerintahan dengan berbagai program yang digulirkan dengan paket kebijakan; Program Inpres Desa Tertinggal, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah pada Desa Tertinggal, Program Pembangunan prasarana pedesaan desa tertinggal, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta perbaikan lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha bagi masyarakat miskin, kenaikan gaji, pengadaan air bersih sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada masyarakat miskin kota, kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, Operasi Pasar Khusus (OPK), beras murah, dan pelayanan angkutan umum akibat kenaikan BBM.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program andalan pemerintah dimana didalamnya terdapat kegiatan prasarana dan simpan pinjam perempuan (SPP) yang di kelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai unit yang mengelola dana bantuan tersebut. Simpan pinjam perempuan merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM Mandiri Perdesaan untuk memprioritas pemberdayaan perempuan. Secara umum kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk pinjaman modal yang diajukan untuk mengembangkan suatu usaha yang semua anggotanya adalah perempuan.

Hasil wawancara dengan Ketua UPK Saudari Eliana (2016), Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penambahan anggota, pada tahun 2014 berjumlah 33 orang dengan rata-rata pinjaman Rp. 10.000.000,-.(dapat dilihat pada lampiran IV)

Pada tahun 2015 jumlah anggota menjadi 39 orang dimana terjadi peningkatan sebesar 18% dengan rata-rata pinjaman Rp. 10.000.000,-

(dapat dilihat pada lampiran V), dan untuk tahun 2016 tidak ada penambahan anggota.

Untuk total dana yang diperoleh UPK dari tahun 2004 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 1.721.500.000,-. Untuk perkembangan perguliran sampai dengan Desember 2015 totalnya Rp. 3.978.714.086,- dana tersebut melayani 16 desa dengan tingkat kemiskinan yang berbeda-beda, sejak tahun 2004 itu pula banyak masyarakat yang menjadi anggota simpan pinjam perempuan memanfaatkan SPP ini dikarenakan tidak perlunya anggunan untuk meminjam dana SPP tersebut, serta tingkat bunga atau jasa hanya 12% pertahun. Anggota yang masih memerlukan modal pada tahun berikutnya masih dapat mengajukan pinjaman, namun adakalanya anggota-anggota yang sudah mampu tidak lagi mengajukan permohonan dana.

Sejak PNPM ini berakhir hanya Program Simpan Pinjam Perempuan yang terus berlanjut dan perlu adanya evaluasi, khususnya Simpan Pinjam Perempuan di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, karena sebuah evaluasi itu sangat penting dilakukan terhadap suatu program, terlebih program tersebut merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya perempuan, dengan adanya sebuah evaluasi akan dapat diketahui apakah program tersebut masihsesuai dengan tujuannya atau tidak.

Berdasarkan observasi awal Program SPP ini sudah lama diikuti oleh kaum perempuan di Desa Paya Bedi, dengan tingkat bunga yang rendah dibandingkan dengan bunga Bank tentunya meringankan dalam pengembalian modalnya, dan bila dilihat masih ada rumah tangga yang tergolong kurang mampu, berangkat dari fenomena ini, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana efektivitas pinjaman dana bergulir terhadap ekonomi masyarakat kurang mampu di Desa Paya Bedi yang telah menjadi anggota dan sebagaimana yang ada pada tujuan program, khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan, sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan judul Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang). Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)

2. KAJIAN LITERATUR

Efektivitas

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 2001:24).

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008:7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13), efektivitas adalah suatu program yang dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik

belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Depdagri, 2008).

Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan secara umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (Depdagri, 2008).

Pinjaman Dana Bergulir

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan 10 pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat-Program Pengembangan Kecamatan (BLM-PPK), BLM-PNPM Mandiri Perdesaan dan sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui UPK, yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui

kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

Kemiskinan

Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Orang disebut miskin jika dalam kadar tertentu sumber daya ekonomi yang mereka miliki di bawah target atau patokan yang telah ditentukan, yang dimaksud dengan kemiskinan sosial adalah kurangnya jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung orang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitasnya meningkat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik individual ataupun perorangan, dalam hal ini diperoleh dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Rantau. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi (Pengamatan), wawancara dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada para responden dan dokumentasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang ada di Desa Paya Bedi di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang serta sudah menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan pada UPK Kecamatan Rantau Desa Bedi sebanyak 208 orang, dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan teknik Slovin menurut Sugiyono (2011:87) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Dari seluruh anggota yang masih aktif sebanyak 208 orang maka diambil batas kesalahan yang diinginkan 10%, sehingga dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = N / (1 + N e^2) = 208 / (1 + 208 \times 0,1^2) \\ = 67,53 \text{ dibulatkan menjadi } 67 \text{ sampel.}$$

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, teknik ini merupakan cara pengambilan sampel tanpa memilih-milih individu yang akan dijadikan sampel.

Metode Analisis Data

Untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu, dilakukan dengan menganalisis hasil pengukuran yang diperoleh dari 154able154ment penelitian dalam hal ini adalah kuesioner. Penentuan tingkat efektivitas pinjaman menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing 154able154ment penelitian. Setiap item 154able154ment penelitian diberi nilai penimbang yang sama, dengan asumsi tidak ada yang saling mendominasi. Nilai penimbang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NP = \frac{\text{JumlahBobot}}{\text{JumlahUnsur}}$$

Selanjutnya untuk memperoleh nilai efektivitas pinjaman SPP digunakan pendekatan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{NilaiPersepsiUnsur}}{\text{UnsuryangTerisi}} \times NP$$

Tabel III-1: Interpretasi Efektivitas

No	Nilai Persepsi	Interval Nilai Rata-rata Tertimbang	Interpretasi
1	1	1,00 – 1,80	Tidak Efektif
2	2	1,81 - 2,60	Kurang Efektif
3	3	2,61 - 3,40	Cukup Efektif
4	4	3,41 - 4,20	Efektif
5	5	4,21 - 5,00	Sangat Efektif

Sumber: Lampiran Kepmenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004

Definisi Operasional Variabel

- a. Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penyaluran dana simpan pinjam perempuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan, yang dinilai berdasarkan tingkat kualitas, dimana kemudahan dalam proses pinjaman seperti tahapan-tahap yang harus dilalui dalam hal pembuatan proposal pengajuan usaha. Tingkat kuantitas dapat dilihat dari sosialisasi program tersebut harus dilakukan dengan baik dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat dilihat dari modal yang diberikan jumlah yang diterima sama nilainya seperti pada proposal yang diajukan, dari modal tersebut harus digunakan untuk mengembangkan atau membuka usaha sehingga diharapkan ada perubahan dalam usatraya tersebut. Dari Hasil Output dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh responden setelah menerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Pinjaman Dana Bergulir atau Simpan Pinjam Perempuan adalah dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat kurang mampu yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam, bukan kepada individu dan dana yang gulirkan dalam bentuk uang tunai.
- c. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang memang belum cukup atau kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dikarenakan kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar dan ketrampilan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak dan kondisi yang demikian disebut dengan kemiskinan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Responden Dirinci Menurut Struktur Umur

Responden dalam penelitian ini adalah anggota yang masih aktif, dan karena spp ini merupakan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan maka anggotanya berjenis kelamin perempuan. Dari hasil penelitian ini setiap responden memiliki struktur umur yang berbeda-beda antara satu responden dengan responden lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-1: Banyaknya Responden Dirinci Menurut Struktur Umur

Struktur Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
15-49	44	65,5
50-64	20	29,9
>65	3	4,5
Jumlah	67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan keadaan umur responden dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok dengan masing-masing jumlah dan persentase diperoleh data yang berbeda. Kelompok 15-49 tahun memperoleh sebesar 44 orang atau sebesar 65,5%. Kelompok 50-64 sebanyak 20 orang atau sebesar 29,9%. Sementara kelompok umur 64 tahun keatas sebanyak 3 orang atau sebesar 4,5%.

Berdasarkan Tabel IV-1 diatas sebagian responden berada dalam stuktur umur 15-49 dimana pada kisaran umur tersebut responden masih dalam kondisi usia sangat produktif yang memiliki kemampuan serta semangat dalam mengembangkan usaha, sebanyak 20 orang tergolong produktif, dan sebanyak 3 orang kurang produktif walaupun demikian mereka masih ada kemauan untuk berusaha dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Responden Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada 67 anggota SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau, dapat diketahui identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan rata-rata anggota SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau adalah lulusan SD sebanyak 8 orang (11,9%), lulusan SMP sebanyak 23 orang (34,3%), untuk lulusan SMA yakni sebanyak 17 orang (25,4%), dan lulusan D3/S1 sebanyak 20 orang (28,4%).

Walaupun ada perguruan tinggi yang bisa dijangkau dari Desa Paya Bedi, namun bila dilihat berdasarkan Tabel IV-2 masih banyak pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 23 orang (34,3%) dikarenakan sebagian penduduknya adalah pendatang dari luar Desa Paya Bedi, sebanyak 19 orang (28,4%) sudah menyandang sarjana namun tidak semua sarjana mempunyai kesempatan untuk

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sehingga memilih memanfaatkan dana spp untuk membuat atau menjalankan usaha yang dapat membantu ekonomi keluarga, diikuti berpendidikan SLTA sebanyak 17 orang (25,4%) dan berpendidikan SD sebanyak 8 orang (11,9%).

Tabel IV-2: Banyaknya Responden Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
SD	8	11,9
SLTP	23	34,3
SLTA	17	25,4
D3/S1	19	28,4
Jumlah	67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Responden Dirinci Menurut Usaha Pokok Yang Dijalankan

Berikut data responden berdasarkan jenis usaha yang dimilikinya, dari kuesioner yang telah diberikan kepada 67 anggota SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau dapat dilihat pada Tabel IV-3.

Tabel IV-3: Banyaknya Responden Dirinci Menurut Usaha Yang Dijalankan

Jenis Usaha	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Bengkel	2	3,0
Jual Makanan	19	28,4
Depot Air	2	3,0
Fotocopy	2	3,0
Isi Ulang	2	3,0
Tilam	3	4,5
Jual Asesoris	8	11,9
Jual Baju	2	3,0
Jual Beli Hasil Perkebunan	1	1,5
Jual Minuman	1	1,5
Jual Pecah Belah	1	1,5
Jual Sayuran	4	6,0
Menjahit	1	1,5
Papan Bunga	2	3,0
Ternak Lembu	2	3,0
Warung Kopi	11	16,4
Waserba	2	3,0
Jumlah	67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Sebagian besar responden mempunyai usaha menjual makanan sebanyak 19 responden atau 28,4%, karena pinjaman dana spp dapat langsung digunakan untuk mengelola usaha yang sederhana dan cepat mendapatkan keuntungan, dibandingkan dengan usaha lain yang harus memerlukan ketrampilan khusus terlebih dahulu. Usaha bengkel, depot air, foto copy, isi ulang tilam, ternak lembu dan warung kopi masing-masing 2 responden (3,0%), mengelola warung serba ada sebanyak 11 responden (16,4%), menjahit sebanyak 4 responden (6,0%), jual asesoris sebanyak 3 responden (4,5%), jual baju sebanyak 8 responden (11,9%), jual beli hasil perkebunan sebanyak 2 responden (3,0%), jual minuman, jual pecah belah, jual sayuran, usaha papan bunga masing-masing 1 responden (1,5%), warung serba ada sebanyak 11 responden (16,4%).

Responden Dirinci Menurut Pekerjaan Suami

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada 67 anggota SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau, dapat diketahui identitas responden berdasarkan pekerjaan suami menunjukkan rata-rata pekerjaan suami anggota SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau adalah buruh harian lepas (BHL) yakni sebanyak 6 (9,1%), datok penghulu, jual sate, karyawan, kepala lorong, mekanik, merantau, pegawai swasta, penjahit sepatu, pegawai negeri sipil, service ac, supir masing-masing sebanyak 1 (1,5%). Guru, menjahit, tenaga kontrak, tukang becak, wiraswasta masing-masing sebanyak 2 (3,5%), tukang bangunan sebanyak 5 (7,5%), petani sebanyak 8 (11,9%), sebanyak 5 responden (7,5%) belum bersuami, dan sebanyak 5 responden (7,5%) tidak bersuami (Janda) dikarenakan telah meninggal dunia, namun mereka tidak mau berpangku tangan dan meminta-minta dan tetap berusaha dengan pinjaman dana spp dengan membuat atau mengembangkan usaha yang hasilnya minimal bias menghidupi diri mereka sendiri. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah responden berdasarkan pekerjaan suami.

Berdasarkan data Tabel IV-4 pekerjaan suami adalah dagang sebanyak 17 orang (25%), pekerjaan ini yang terbanyak dikarenakan biasanya suami ikut terlibat dalam usaha yang dijalankan istri atau usaha yang dijalankan dan dikelola bersama-sama.

Tabel IV-4: Banyaknya Responden Dirinci Menurut Pekerjaan Suami

Pekerjaan Suami	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
BHL	6	9
Dagang	17	25,4
Datok	1	1,5
Penghulu	2	3,0
Guru	1	1,5
Jual Sate	1	1,5
Karyawan	1	1,5
Keplor	1	1,5
Mekanik	5	7,5
Meninggal Dunia	2	3,0
Menjahit	1	1,5
Merantau	1	1,5
Pegawai Swasta	1	1,5
Penjahit Sepatu	8	12
Petani	1	1,5
PNS	1	1,5
Service AC	1	1,5
Supir	2	3,0
Tenaga Kontrak	5	7,5
Tukang Bangunan	2	3,0
Tukang Becak	2	3,0
Wiraswasta	5	7,5
Jumlah	67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Motivasi yang mendorong untuk melakukan pinjaman SPP

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah diberikan kepada 67 anggota SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau, dapat diketahui motivasi yang mendorong untuk melakukan pinjaman SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau sebanyak sebanyak 58 responden (86,6%) memilih tingkat bunga yang rendah, sebanyak 6 responden (9,0%) memilih ingin mengembangkan usaha sebanyak 3 responden (4,5%) memilih karena adanya kemudahan memperoleh pinjaman. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah responden berdasarkan Motivasi yang mendorong untuk melakukan pinjaman SPP.

Dari data Tabel IV-5 diatas sebahagian besar menunjukkan bahwa tingkat bunga yang rendah menjadi alasan utama dalam mengajukan pinjaman dana SPP, namun bila diperhatikan ditambah lagi karena tidak perlunya anggungan

dalam mengajukan pinjaman modal tersebut, sedangkan umumnya di lembaga keuangan yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank harus mempunyai anggungan minimal buku kepemilikan kendaraan bermotor.

Tabel IV-5: Banyaknya Responden Dirinci Menurut Motivasi yang mendorong untuk melakukan pinjaman SPP

Motivasi yang mendorong pinjaman SPP	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
a. Kekurangan Modal	-	-
b. Tingkat Bunga yang rendah	58	86,6
c. Mengembangkan Usaha	6	9,0
d. Kemudahan Memperoleh Pinjaman	3	4,5
Jumlah	67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Deskripsi Variabel Penelitian

a. Tingkat Kualitas

Berdasarkan data pada tabel IV-6 dapat dilihat bahwa sebanyak 67 responden (100%) menyatakan bahwa proses pengajuan proposal spp mudah, hasil wawancara salah satu responden Ibu Leli Ariani (45 tahun) menyatakan “*walaupun ada tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan proposal, namun kalau memang tidak ada menunggu maka proposal dapat diterima dan dana dapat dicairkan tidak lama kemudian*”.

Tabel IV-6: Distribusi Responden Berdasarkan Kemudahan Dalam Proses Pengajuan Proposal SPP

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	-	-
2	Setuju	67	100
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel IV-7 responden sebanyak 62 responden (92,5%) setuju dan 5 responden (7,5%) responden memilih sangat setuju, dapat disimpulkan bahwa masyarakat

yang kurang mampu pun bisa terbantu berkat dana tersebut dengan tidak memberatkan anggota-anggotanya.

Tabel IV-7: Distribusi Responden Berdasarkan Mampu Membantu Masyarakat Kurang Mampu

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	5	7,5
2	Setuju	62	92,5
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Tabel IV-8: Distribusi Responden Berdasarkan Pengembalian Yang Terlambat Tidak Dikenakan Denda

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	-	-
2	Setuju	54	80,6
3	Kurang setuju	9	13,4
4	Tidak setuju	4	6,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel IV-8 disimpulkan responden sebanyak 54 responden (80,6%) setuju bahwa tidak ada denda, sebanyak 9 responden (13,4%) responden memilih kurang setuju dan sebanyak 4 (6,0%) responden tidak setuju.

Dari data ini menunjukkan ada perbedaan pemahaman mengenai denda tersebut, hasil wawancara salah satu responden Ibu Eli Mawarni (52 tahun) menyatakan *“memang tidak ada denda terhadap anggota yang menunggak, namun pada saat bulan terakhir pelunasan ada anggota yang menunggak maka untuk pengajuan proposal kelompok berikutnya tidak dapat diterima sampai anggota yang bersangkutan melunasinya, nah....inilah bisa dianggap sebagai denda”*.

Berdasarkan data pada Tabel IV-9 disimpulkan responden sebanyak 27 responden (40,3%) setuju, sebanyak 38 responden (56,7%) responden memilih kurang setuju dan sebanyak 2

responden (3,0%) responden tidak setuju. Dari data ini menunjukkan sebanyak 38 responden (56,7%) kurang setuju dan 2 responden (3,0%) tidak setuju, hasil wawancara salah satu responden Ibu Eli Mawarni (52 tahun) melanjutkan pernyataannya *“pengajuan pinjaman dilakukan sesuai prosedur yakni apabila pinjaman sebelumnya sudah habis dan tidak ada yang menunggak bisa langsung diajukan, namun mungkin bisa masuk dalam daftar tunggu apabila dana di kas UPK tidak mencukupi atau sama sekali tidak ada”*.

Tabel IV-9: Distribusi Responden Berdasarkan Pengajuan Pinjaman Dapat Dilakukan Kapan Saja

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	-	-
2	Setuju	27	40,3
3	Kurang setuju	38	56,7
4	Tidak setuju	2	3,0
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Tabel IV-10: Distribusi Responden Berdasarkan Pinjaman Dapat Ajukan Oleh Semua Kelompok Perempuan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1
2	Setuju	66	99
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel IV-10 sebanyak 66 responden (98,5%) memilih setuju dan 1 (1,5%) responden memilih sangat setuju, dapat simpulkan bahwa sesuai dengan tujuan awal SPP merupakan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini, memang dikhususkan untuk kaum perempuan, maka semua anggotanya berjenis kelamin perempuan.

b. Tingkat Kuantitas

Berdasarkan table IV-11 sebanyak 67 responden setuju bila penyalurannya SPP sesuai dengan tujuannya yaitu bagi yang tidak mampu, namun bila dilihat kembali pada tabel IV-4 Distribusi Responden Dirinci Menurut Pekerjaan Suami, dapat disimpulkan ada anggota yang memang kategori mampu seperti pekerjaan suaminya Datok Penghulu (Kepala Desa) dan PNS, hal ini sudah keluar dari ketentuan, yang seharusnya tidak bisa sebagai penerima dana SPP, namun sepertinya ini dibiarkan saja oleh Tim Verifikasi yang terpenting tidak terjadi penunggakan saat pengembalian dana nantinya.

Tabel IV-11: Distribusi Responden Berdasarkan Penyalurannya SPP Sesuai Dengan Tujuannya

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	66	98,5
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Tabel IV-12: Distribusi Responden Berdasarkan Sosialisasi Program Harus Dilakukan Dengan Baik Dan Menyeluruh Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	-	-
2	Setuju	67	100
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV-12 sebanyak 67 responden (100%) setuju bila sosialisasi program harus dilakukan dengan baik dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tempat yang paling dekat untuk mencari informasi tentang

kegiatan simpan pinjam perempuan adalah kepala desa, namun informasi ini dapat disebarkan saat wirid yasin atau pada saat adanya arisan dan dapat pula di cari di media massa khususnya elektronik yang dapat diakses bahkan sampai di desa- desa. Informasi sangat penting sekali bagi masyarakat yang memang membutuhkan penjelasan secara mendetail mengenai pinjaman dana SPP karena semua berhak mengetahui apalagi bagi orang-orang yang tidak mampu.

Tabel IV-13: Distribusi Responden Berdasarkan Jangka Waktu Pengembalian Tidak Lebih Dari 12 Bulan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	56	83,6
3	Kurang setuju	10	14,9
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel IV-13 dapat dilihat 56 responden atau 83,6% setuju dengan jangka waktu 12 bulan dan 10 responden atau 14,9% kurang setuju dengan alasan waktu pengembalian terlalu singkat, pada dasarnya jangka waktu pengembalian bisa lebih dari 12 bulan tetapi semua itu dikembalikan ke UPK selaku pengelola dana, karena mereka yang mengatur semua dari mulai penerimaan proposal sampai kepada pencairan dana, sehingga jangka waktu pengembalian telah ditetapkan pada saat sosialisasi pertama kali.

Tabel IV-14: Distribusi Responden Berdasarkan Persyaratan Pinjaman Tidak Dipersulit

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	66	98,5
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data tabel IV-14 hasil kuesioner 100% setuju persyaratan pinjaman tidak dipersulit, walaupun semua responden menyatakan pernah diminta oleh pihak pengelola SPP PNPM-MP yakni persyaratan untuk mendapatkan pendanaan tersebut namun tidak menjadi suatu kesulitan bagi para penerima dana SPP, untuk mendapatkan pendanaan simpan pinjam perempuan seorang anggota kelompok harus melengkapi persyaratan berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan foto usaha.

Tabel IV-15: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman Mempengaruhi Jumlah Penghasilan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	-	-
2	Setuju	39	58,2
3	Kurang setuju	28	41,8
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel IV-15 dapat dilihat bahwa 39 responden atau 58,2% setuju dengan alasan karena tidak membuat usaha baru hanya mengembangkan atau membeli dan menambah alat-alat produksi dan atau membeli barang-barang dengan berbagai jenis sehingga penghasilan bisa bertambah, sedangkan 28 responden atau 41,8% tidak setuju dikarenakan mereka membuat usaha baru atau usaha dari nol dan sebagian responden menggunakan pinjaman dari PNPM-MP untuk kebutuhan pribadi.

c. Modal

Berdasarkan tabel IV-16 sebanyak 60 responden atau 89,6% setuju dan 1 atau 1,5% responden sangat setuju penyaluran modal yang dipinjamkan sesuai dengan jenis usaha, dan sebanyak 6 responden atau 9,0% tidak setuju setelah dana diterima oleh anggota terkadang anggota sudah menyalahi ketentuan yakni modal yang didapat tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tetapi digunakan untuk konsumsi pribadi serta membeli barang-barang yang kurang perlu.

Tabel IV-16: Distribusi Responden Berdasarkan Dalam Penyalurannya Modal Yang Dipinjamkan Sesuai Dengan Jenis Usaha

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	60	89,6
3	Kurang setuju	6	9,0
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV-17 sebanyak 3 responden atau 4,5% sangat setuju dan sebanyak 48 responden atau 71,6% setuju modal yang dipinjamkan digunakan untuk mengembangkan usaha, sedangkan 16 responden atau 23,9% kurang setuju karena modal yang di dapat sangat kecil sehingga hanya bisa digunakan menambah modal yang sudah ada

Tabel IV-17: Distribusi Responden Berdasarkan Modal Yang Dipinjamkan Digunakan Untuk Mengembangkan Usaha

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	3	4,5
2	Setuju	48	71,6
3	Kurang setuju	16	23,9
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan Tabel IV-18 sebanyak 1 responden atau 1,5% sangat setuju dan sebanyak 54 responden atau 80,6% setuju jumlah pinjaman sesuai dengan yang diajukan di dalam proposal kelompok, sedangkan sebanyak 12 responden atau 17,9% tidak setuju.

Dari data ini menunjukkan ada perbedaan dana yang di proposal dengan dana setelah diterima, hasil wawancara salah satu responden Ibu Evika Janah (45 tahun) menyatakan “*perbedaan antara di proposal dengan dana setelah diterima terkadang beda dikarenakan banyak yang ingin meminjam dalam jumlah sedikit, sehingga ketua*

kelompok berinisiatif untuk menggabungkan beberapa pinjaman di dalam satu nama”.

Tabel IV-18: Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pinjaman Sesuai Dengan Yang Diajukan Didalam Proposal Kelompok

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	54	80,6
3	Kurang setuju	12	17,9
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel IV-19 sebanyak 2 responden atau 3,0% sangat setuju, sebanyak 48 responden atau 71,6% setuju, sebanyak 12 responden atau 17,9% kurang setuju dan sebanyak 5 responden atau 7,5% tidak setuju.

Tabel IV-19: Distribusi Responden Berdasarkan Modal Yang Didapat Bisa Digunakan Untuk Keperluan Lainnya

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	2	3,0
2	Setuju	48	71,6
3	Kurang setuju	12	17,9
4	Tidak setuju	5	7,5
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data Tabel IV-19 setiap responden setelah mendapatkan pinjaman motifnya bisa berubah dari yang awalnya ingin mengembangkan usaha, bisa jadi pinjaman tersebut digunakan untuk konsumtif, terlihat 48 responden menyatakan setuju modal yang di dapat bisa digunakan untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan data pada Tabel IV-20 dapat dilihat bahwa mayoritas atau 66 responden (98,5%) setuju bahwa jasa yang dibebankan sangat ringan yakni 12% pertahun atau 1% setiap bulannya, bila seorang anggota meminjam Rp. 1.000.000,- maka Rp. 1000.000 x 12% hasilnya

Rp. 120.000,-/ tahun, dalam 1 bulan hanya Rp. 10.000,- bunga yang dibebankan kepada anggota spp, dan bila ditempat lain bisa mencapai 2% sampai 3% setiap bulannya. Artinya keringanan ini memang dirasakan langsung oleh ibu-ibu anggota SPP.

Tabel IV-20: Distribusi Responden Berdasarkan Jasa Yang Dibebankan Lebih Ringan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	66	98,5
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Hasil wawancara salah satu responden Ibu Ernawati (34 tahun) dalam pernyataannya “saat itu suami saya butuh dana untuk membeli becak dan karena tidak ada informasi lain dengan terpaksa saya harus meminjam ditempat itu (lembaga bukan bank), setelah dihitung-hitung bunga hampir 3x lipat dari yang saya pinjam tapi karena butuh terpaksa saya ambil juga”.

d. Hasil/ Output

Tabel IV-21: Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Anggota Mengalami Peningkatan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	9	13,4
2	Setuju	46	68,7
3	Kurang setuju	12	17,9
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel IV-21 dapat dilihat bahwa sebanyak 9 responden atau 13,4% sangat setuju dan 46 responden atau 68,7% setuju dan menyatakan pendapatannya bertambah dikarenakan modal SPP yang dipinjamkan

ditambahkan ke usaha yang dijalankan, sedangkan 12 responden atau 17,9% tidak setuju karena penghasilan yang diperoleh sama saja.

Berdasarkan data pada Tabel IV-22 dibawah dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju karena saat mengajukan pinjaman tidak diperlukan anggunan dan hal ini tentunya mempermudah bagi orang yang tidak mampu hanya saja tinggal kemauan ada atau tidak untuk menjalankan usaha yang dimulai dengan kecil-kecilan.

Tabel IV-22: Distribusi Responden Berdasarkan Menciptakan Kesempatan Kerja bagi Masyarakat Miskin

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	1	1,5
2	Setuju	66	98,5
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Tabel IV-23: Distribusi Responden Berdasarkan Meningkatkan Kesejahteraan Individu Dan Kelompok

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	7	10,4
2	Setuju	46	68,7
3	Kurang setuju	14	20,9
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Data pada Tabel IV-23 sebanyak 7 responden atau 10,4% sangat setuju dan 46 responden atau 68,7% setuju bisa meningkatkan kesejahteraan individu dan kelompok, sedangkan 14 responden atau 20,9% kurang setuju dengan alasan masing-masing anggota mempunyai usaha yang berbeda dan juga dijalankan sendiri-sendiri sehingga apabila mendapatkan hasil atau keuntungan tentunya hanya untuk diri sendiri juga, tidak ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan kelompok, ada kalanya anggota yang lain tidak

mendapatkan keuntungan dan bisa jadi sebaliknya usaha yang dijalankan bangkrut karena suatu sebab.

Berdasarkan data pada Tabel IV-24 sebanyak 3 responden atau 4,5% sangat setuju dan sebanyak 54 responden atau 80,6% setuju bila barang-barang pendukung untuk berusaha ada penambahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan, dan sebanyak 10 responden atau 14,9% tidak setuju dikarenakan pada saat membuka usaha mereka memulai dengan dana besar dan peralatan yang lengkap sehingga dana pinjaman SPP hanya sebagai dana cadangan.

Tabel IV-24: Distribusi Responden Berdasarkan Meningkatkan Barang-Barang Yang Dipakai Untuk Berusaha

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	3	4,5
2	Setuju	54	80,6
3	Kurang setuju	10	14,9
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel IV-25 sebanyak 4 responden sangat setuju atau 6,0% dan 63 responden atau 94,0% setuju bila pinjaman dana SPP ini secara umum mengurangi angka kemiskinan, walaupun tidak ada angka yang pasti berapa tingkat kemiskinan berkurang, namun dapat diambil kesimpulan mayoritas responden merasa angka kemiskinan tetap berkurang.

Tabel IV-25: Distribusi Responden Berdasarkan Secara Umum Mengurangi Angka Kemiskinan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	4	6,0
2	Setuju	63	94,0
3	Kurang setuju	-	-
4	Tidak setuju	-	-
5	Sangat tidak setuju	-	-
Jumlah		67	100

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Data Kondisi Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Pinjaman

Berdasarkan tabel IV-26 dapat dilihat bahwa sebanyak 5 responden (7,5%) pendapatan dari hasil usaha lebih dari Rp. 2.000.000, sebanyak 12 responden (17,9%) pendapatan hasil usahanya antara Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, sebanyak 35 responden (52,2%) pendapatan hasil usahanya antara Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000, dan dibawah Rp. 500.000 sebanyak 12 responden (17,9%). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan usaha yang diperoleh masih relatif kecil sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari belum cukup dan tanggungan responden dalam rumah tangga cukup besar.

Tabel IV-26: Pendapatan Hasil Usaha Sebelum Menerima Pinjaman

Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp. 500.000	12	17,9
> Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	35	52,2
> Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	12	17,9
> Rp. 2.000.000	5	7,5
Jumlah	65	93,25

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Tabel IV-27: Pendapatan Hasil Usaha Setelah Menerima Pinjaman

Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
< Rp. 500.000	5	7,5
> Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	13	19,4
> Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000	33	49,3
> Rp. 2.000.000	13	19,4
Jumlah	63	94,16

Sumber: Hasil penelitian 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel IV-27 dapat dilihat bahwa sebanyak 13 responden (19,4%) pendapatan dari hasil usaha lebih dari Rp. 2.000.000, sebanyak 33 responden (49,3%) pendapatan hasil usahanya antara Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, sebanyak 13 responden (19,4%) pendapatan hasil usahanya antara Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000, dan dibawah Rp. 500.000 sebanyak 5 responden (7,5%) hal ini disebabkan karena jenis usaha yang dikelola masih kecil sehingga pendapatan yang diperoleh pun masih sedikit. Dari ke 2 (dua) tabel diatas dapat disimpulkan hanya

67% responden yang pendapatan hasil usahanya mengalami peningkatan, dan hal ini berarti dari dana pinjaman tersebut tidak semuanya digunakan untuk mengembangkan usaha, ada yang digunakan untuk membantu saudara dan juga digunakan untuk membayar hutang serta untuk keperluan lainnya, termasuk didalamnya 2% responden yang tidak mempunyai usaha.

Pembahasan

Penentuan tingkat efektivitas pinjaman SPP menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing instrumen penelitian. Karena instrumen yang digunakan berjumlah 20, maka berdasarkan rumus pada BAB III, diperoleh Nilai Penimbang (NP) sebesar 0,050 dan diketahui total dari nilai per unsur yaitu masing-masing: 268, 273, 251, 226, 269, 269, 269, 259, 269, 240, 263, 255, 257, 248, 269, 265, 269, 261, 261, 272, sedangkan unsur yang terisi sebesar 25. Selanjutnya untuk memperoleh nilai efektivitas pinjaman dana SPP digunakan pendekatan nilai IKM diperoleh hasil 3.89 dibulatkan menjadi 4.

Hasil analisis efektivitas pinjaman dana SPP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan bahwa program pinjaman dana tersebut sangat berhasil dilihat dari 4 (empat) indikator berdasarkan kuisioner. Dilihat dari Tingkat Kualitas pinjaman dana SPP kemudahan dalam pengajuan proposal dirasakan semua responden, sampai pada saat apabila terjadi keterlambatan pihak UPK tidak memberikan denda kepada anggota yang menunggak, Tingkat Kuantitas pinjaman SPP sudah terlihat sejak syarat-syarat untuk pengajuan tidak dipersulit dan penyalurannya sudah sesuai dengan tujuan, dari segi Modal, jumlah di proposal sudah sesuai pada saat penerimaan artinya jumlahnya tidak dikurangi atau ditambahi pada saat serah terima dan digunakan untuk mengembangkan usaha karena terdorong jasa yang rendah, meskipun ada anggota yang tidak menggunakan dana 100% untuk permodalan tetapi usaha anggota cukup berkembang dengan adanya bantuan tersebut, sedangkan jika dilihat dari Hasil/ Output pinjaman dana SPP memberikan hasil yang diharapkan oleh setiap anggota dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan adanya peluang kerja untuk orang lain.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Efektivitas Pinjaman dana bergulir PNPM-MP di Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang interpretasinya adalah tergolong efektif dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 4. Hasil efektif ini bahwa hamper seluruh anggota kelompok menggunakan dana bantuan untuk kegiatan produktif dengan menambahkan modal untuk usaha-usaha yang mereka jalankan agar usaha lebih berkembang. Simpan Pinjam Perempuan dapat membantu dalam meningkatkan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada masyarakat desa, yang selama ini bergantung pada pinjaman Bank atau rentenir yang bunga sangat tinggi atau mereka yang ingin mengembangkan usaha namun masih kekurangan modal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.

6. REFERENSI

- Abdurahmat. (2008). *Efektivitas Organisasi Edisi Pertama*. Jakarta: Airlangga
- Amelinda Rantin, Gianina. (2014). "Efektifitas Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulagi, Manado*. Vol. 4, No. 4
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2008). *PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2008). *Penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Jendral pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Menteri Negara Kependudukan, BKKBN. (1996). *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kantor Menteri Negera Kependudukan.
- Maulidyah, Hikmatul, Rully. (2014). "Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*. Vol. 2, No. 2
- Putri Kirana, Maya. (2012). "Efektivitas Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan*. Vol. 5, No. 5
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang, P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: CV. Alfabeta